

OPTIMALISASI SARPRAS BERBASIS KODE ETIK UNTUK MENDUKUNG SDGs DI SMP MUHAMMADIYAH 9 BOARDING SCHOOL TANGGULANGIN

Dinda Ayu Maharani

UIN Sunan Ampel Surabaya

dindamaharani641@gmail.com

Abstract: Pendidikan berkualitas membutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) yang optimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi sarpras berbasis kode etik di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Tanggulangin untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penerapan kode etik dalam pengelolaan sarpras terhadap transparansi, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan kepala sekolah, guru, staf, dan siswa sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan kode etik, pengelolaan sarpras cenderung tidak terstruktur dan kurang transparan, menghambat optimalisasi pembelajaran. Setelah penerapan kode etik berbasis prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), terjadi peningkatan signifikan dalam transparansi, akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan pemeliharaan sarpras. Pembahasan mengungkap relevansi pengelolaan sarpras ini dengan SDGs, terutama dalam mendukung pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik berperan penting dalam menciptakan manajemen sarpras yang berstandar tinggi, sehingga dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya.

Keywords: Pendidikan, Optimalisasi Sarpras, kode etik

PENDAHULUAN

Sarpras memiliki peran penting dalam menjamin mutu pendidikan. Sarana dan prasarana mencakup berbagai elemen yang mendukung pembelajaran, baik secara langsung seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan, maupun secara tidak langsung seperti

area rekreasi dan fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai tidak hanya memenuhi persyaratan akreditasi formal, tetapi juga menjadi dasar bagi terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran yang terus berubah, pengelolaan sarpras harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ini termasuk penyediaan fasilitas modern seperti teknologi pendukung pembelajaran daring dan hibrida. Selain itu, pengelolaan yang baik melalui perencanaan strategis, pemeliharaan berkala, dan evaluasi rutin menjadi bagian integral dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas.¹

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan akses dan mutu fasilitas pendidikan. Dengan infrastruktur yang memadai, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Pengelolaan yang optimal terhadap sarpras juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing institusi melalui akreditasi yang lebih baik dan mencetak lulusan yang berkualitas. Studi kasus di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut menunjukkan bahwa sarpras yang memenuhi standar kualitas berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sarpras sebagai investasi strategis untuk memastikan pendidikan yang lebih baik di masa depan.²

Sarana dan prasarana adalah elemen penting dalam dunia pendidikan yang memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman. Namun, bagaimana lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis Islam, dapat mengatasi kendala pengelolaan sarpras seperti keterbatasan dana, rendahnya transparansi, dan kurangnya efisiensi? Kendala-kendala ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan tetapi juga menantang upaya untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan inklusif dan berkelanjutan.³ Dalam konteks ini, apakah penerapan kode etik dalam pengelolaan sarpras dapat menjadi solusi strategis? Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi ke dalam prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), pengelolaan sarpras diharapkan mampu meningkatkan

¹ Suharyanto H Soro dkk., "Implementasi Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Di Institut Perguruan Tinggi (IPI) Garut," *Journal for Islamic Studies* 6, no. 2 (2023).

² Milda Mutia Ramadhani, "Analisis Strategi Pendidikan Inklusif Berbasis Sains dan Teknologi dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di Indonesia," 2023.

³ Catur Widiatmoko dkk., "PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI WUJUD PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 6, no. 2 (20 November 2024): 40–47, <https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i2.273>.

efisiensi dan akuntabilitas. Apakah perencanaan yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan rutin dapat menjamin optimalisasi sarpras untuk mendukung proses pembelajaran? Selain itu, dapatkah kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengelola fasilitas pendidikan secara berkelanjutan? Dengan semua ini, penerapan kode etik dalam pengelolaan sarpras tidak hanya mendukung pembelajaran berkualitas tetapi juga memperkuat kontribusi lembaga pendidikan dalam mencapai SDGs 2030.

LANDASAN TEORI

Dalam konteks pendidikan Islam, sarana dan prasarana (sarpras) memainkan peran krusial dalam mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. Sarana mencakup berbagai perangkat yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, buku, dan laboratorium, sementara prasarana meliputi fasilitas penunjang seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan koneksi internet. Kedua elemen ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dalam hal akademik maupun spiritual.⁴ Pengelolaan sarpras yang optimal melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, serta perawatan agar tetap berfungsi secara efisien. Dengan demikian, sarpras berperan penting dalam memastikan proses pendidikan berjalan lancar dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam, yaitu mencetak individu yang beriman, cerdas, dan berbudi pekerti luhur.

Kode Etik dalam Manajemen Pendidikan

Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tanggung jawab merupakan dasar penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang adil, efektif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Transparansi memastikan bahwa semua informasi penting terkait pengambilan keputusan, kebijakan, dan alokasi sumber daya dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan meminimalisasi potensi kesalahpahaman. Akuntabilitas menuntut setiap individu atau tim untuk bertanggung jawab atas tugas dan hasil kerjanya, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki konsekuensi yang jelas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah tentang penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil terbaik tanpa pemborosan, baik itu waktu, tenaga, maupun dana.

⁴ Dwi Iwan Suranto dkk., "PENTINGNYA MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN," *Jurnal Kiprah Pendidikan* 1, no. 2 (30 April 2022): 59–66, <https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>.

Prinsip ini membantu organisasi pendidikan untuk tetap fokus pada tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Tanggung jawab melibatkan komitmen setiap pihak untuk memenuhi perannya dengan integritas, baik dalam menyusun kebijakan, mengelola sumber daya, maupun memberikan layanan pendidikan.⁵ Kombinasi dari prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas manajemen pendidikan tetapi juga membangun budaya organisasi yang kuat, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta masyarakat luas.

Pendidikan karakter adalah proses upaya secara sadar dan terencana untuk karya sehingga anak didik memiliki karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli, dan kreatif.⁶

SDGs dalam Pendidikan

Pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan adalah inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui pendekatan ini, pendidikan diharapkan tidak hanya fokus pada hasil akademik tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab lingkungan. Konsep ini diterapkan melalui integrasi nilai-nilai keberlanjutan, seperti perlindungan lingkungan, kesetaraan sosial, dan pembangunan ekonomi, ke dalam kurikulum pendidikan. Sebagai contoh, isu perubahan iklim dapat diajarkan melalui mata pelajaran biologi untuk meningkatkan literasi lingkungan siswa. Hal ini memungkinkan siswa memahami peran mereka sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Dengan model pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis nilai SDGs, siswa tidak hanya mengembangkan pengetahuan tetapi juga keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan kolaborasi. Pendidikan ini membentuk individu yang peduli terhadap masa

⁵ Rizki Andre Handika, Titik Istikhoratun, dan Luqman Buchori, "Kajian Peranan dan Penerapan Kode Etik Profesi Keinsinyuran dalam Praktik Pekerjaan Bidang Sipil dan Lingkungan di Indonesia untuk Meningkatkan Efisiensi dan Perlindungan Keselamatan Kerja" 2 (t.t.).

⁶ Zusnani, Ida. *Managemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa*. Jakarta Selatan: Tugu Publiser, 2012),155.

depan, mampu menghadapi tantangan global, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam dan detail, khususnya mengenai penerapan kode etik berbasis POAC dalam pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School. Subjek penelitian melibatkan kepala sekolah, guru, staf, dan siswa sebagai informan kunci untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi yang dikaji. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan pandangan subjek, observasi langsung di lingkungan sekolah untuk mengamati praktik pengelolaan sarpras secara nyata, serta dokumentasi berupa kebijakan, laporan, dan catatan terkait sebagai sumber validasi tambahan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dan memisahkan data penting dari yang kurang signifikan; penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif yang terstruktur untuk mempermudah interpretasi; serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis kritis terhadap temuan lapangan guna memberikan pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tidak hanya tentang fakta yang ada, tetapi juga makna di balik fenomena tersebut, sehingga dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan kode etik dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sarpras.⁸ Metode ini juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung peneliti dengan subjek penelitian untuk memastikan keakuratan data yang dihasilkan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori atau praktik yang relevan dalam bidang pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diterapkannya kode etik berbasis sistem POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School, kondisi sarpras mengalami banyak tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah

⁷ Maria Tareze, Indri Astuti, dan Afandi, "MODEL PEMBELAJARAN KOLABORASI SDGs DALAM PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI PENGENALAN ISU GLOBAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN SOSIAL PESERTA DIDIK," *Visipena* 13, no. 1 (21 Desember 2022): 42–53, <https://doi.org/10.46244/visipena.v13i1.1978>.

⁸ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

ketidakteraturan dalam manajemen. Banyak fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan area lainnya tidak dikelola dengan baik, sehingga beberapa di antaranya menjadi rusak dan tidak dapat digunakan secara optimal. Misalnya, tidak ada sistem atau jadwal pemeliharaan rutin yang menyebabkan fasilitas sering kali dibiarkan dalam kondisi rusak hingga membutuhkan perbaikan besar, yang memakan biaya lebih banyak. Kurangnya sistem inventarisasi yang jelas juga mengakibatkan distribusi dan penggunaan sarpras menjadi tidak merata.

Inefisiensi juga menjadi masalah serius. Ketidakmampuan untuk merencanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras dengan matang menyebabkan banyak fasilitas yang sebenarnya bermanfaat tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, laboratorium yang seharusnya mendukung kegiatan pembelajaran siswa justru dibiarkan kosong atau tidak terawat, sehingga menghambat proses pembelajaran. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk pengelolaan sarpras tidak efisien karena sering kali hanya difokuskan pada pengadaan baru daripada perbaikan atau pemeliharaan rutin.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan sarpras juga menjadi salah satu tantangan terbesar. Tidak adanya dokumentasi yang jelas mengenai status fasilitas atau proses pengelolaannya membuat pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah dan komite, kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi. Hal ini menciptakan celah untuk potensi penyalahgunaan dana atau pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Tanpa transparansi, sulit untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara adil dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kondisi sarpras sebelum penerapan kode etik berbasis POAC mencerminkan kurangnya perencanaan strategis, pengawasan, dan koordinasi. Masalah-masalah ini tidak hanya menghambat proses pembelajaran tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan belajar, yang berdampak negatif pada pengalaman pendidikan siswa dan guru. Upaya penerapan kode etik ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terstruktur untuk mengatasi ketidakteraturan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pengelolaan yang lebih transparan serta akuntabel.

Implementasi Kode Etik dalam Pengelolaan Sarpras

Implementasi kode etik dalam pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School dilakukan berdasarkan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), yang terintegrasi dalam semua tahapan manajemen. Tahap pertama, **Planning (Perencanaan)**,

dimulai dengan rapat kerja tahunan yang melibatkan seluruh staf sekolah untuk menyusun program prioritas pengelolaan sarpras. Perencanaan ini mencakup pembagian program jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan fleksibilitas menghadapi kebutuhan mendesak, seperti kerusakan fasilitas. Misalnya, perbaikan rutin pompa air dan pengadaan alat belajar dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Tahap kedua, **Organizing (Pengorganisasian)**, menekankan pembagian tanggung jawab yang jelas. Staf sekolah dan asrama diberi peran khusus sesuai tugas masing-masing, sementara untuk kegiatan besar, kedua divisi bekerja sama secara terkoordinasi. Pembagian ini dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) yang memastikan setiap pihak memahami tanggung jawab mereka secara jelas dan terstruktur. Tahap ketiga, **Actuating (Pelaksanaan)**, melibatkan seluruh staf dalam melaksanakan program yang dirancang, seperti pembersihan gedung secara rutin, pemotongan rumput, dan pemeliharaan fasilitas lainnya. Semangat kerja sama antar staf ditekankan dalam setiap kegiatan, dengan ceklis harian untuk memastikan tugas-tugas telah diselesaikan sesuai jadwal. Terakhir, **Controlling (Pengawasan)** dilakukan melalui evaluasi berkala. Rapat evaluasi mingguan menjadi momen penting untuk memantau kendala yang muncul dan memastikan program berjalan sesuai rencana.⁹

Selain penerapan prinsip POAC, langkah **sosialisasi** kode etik menjadi elemen penting untuk keberhasilannya. Sosialisasi dilakukan melalui rapat pleno yang melibatkan seluruh staf dan guru untuk memperkenalkan standar kode etik dan prinsip manajemen yang diterapkan. Dalam proses ini, diberikan pelatihan kepada staf sarpras untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kualitas fasilitas. Sosialisasi ini juga disertai dengan pembagian tugas yang lebih detail melalui instruksi tertulis, memastikan tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. **Pembagian tanggung jawab** yang jelas menjadi salah satu kekuatan dalam implementasi kode etik. Guru, siswa, dan staf dilibatkan dalam menjaga sarpras, seperti kebiasaan membersihkan ruang kelas dan area sekolah secara rutin. Pemimpin sekolah, termasuk kepala sekolah, memegang peran kunci sebagai pengawas utama yang memastikan bahwa semua pihak mematuhi kode etik dan berkontribusi dalam pengelolaan sarpras yang baik. Dengan pendekatan ini, implementasi kode etik tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga menciptakan budaya kerja sama yang kuat di lingkungan sekolah. Proses pengawasan dan evaluasi rutin memastikan semua pihak bertanggung jawab atas perannya masing-masing,

⁹ Hurriyah, A. I. (2021). Implementasi Manajemen Peserta Didik di Mts Hidayatusshibyan Karang Sari Kutowinangun (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen).

sehingga pengelolaan sarpras menjadi lebih efektif dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.¹⁰

Dampak Optimalisasi Sarpras Berbasis Kode Etik

Optimalisasi sarana dan prasarana (sarpras) berbasis kode etik di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pembelajaran. Dalam hal **efisiensi**, penerapan kode etik berbasis prinsip POAC memastikan semua fasilitas dikelola dengan jadwal pemeliharaan yang rutin dan terstruktur. Program perawatan preventif, seperti pembersihan harian dan pemeriksaan berkala, membantu mencegah kerusakan besar yang membutuhkan biaya perbaikan tinggi. Selain itu, pembagian tanggung jawab yang jelas di antara staf melalui Surat Keputusan (SK) memastikan setiap tugas terselesaikan tanpa tumpang tindih, sehingga waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal. Dalam aspek **transparansi**, adanya dokumentasi yang jelas terkait kondisi sarpras dan pelaporan rutin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga evaluasi, dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh pihak terkait, seperti kepala sekolah dan komite. Transparansi ini mengurangi risiko penyalahgunaan dana serta memastikan prioritas pengelolaan difokuskan pada kebutuhan mendesak.

Dampak positif ini juga dirasakan langsung dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Sarpras yang terawat baik, seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya, menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Guru dapat memanfaatkan berbagai sarana, seperti teknologi pembelajaran dan alat peraga, untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Siswa pun lebih fokus dan termotivasi dalam belajar karena merasa didukung oleh fasilitas yang memadai. Ketersediaan sarpras yang berkualitas memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, tanpa gangguan akibat kurangnya fasilitas. Selain itu, keterlibatan semua pihak dalam menjaga sarpras, termasuk siswa dan staf, menciptakan rasa tanggung jawab bersama, yang memperkuat budaya kerja sama di lingkungan sekolah. Dengan pengelolaan sarpras yang lebih efektif, efisien, dan transparan, kualitas pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School meningkat secara keseluruhan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut sebagai penyedia pendidikan berkualitas.

Pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) memiliki relevansi yang signifikan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pengelolaan

¹⁰ Disusun Oleh, "PROSEDUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR," t.t.

sarpras yang baik dapat mendukung tujuan-tujuan seperti pengurangan limbah, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Misalnya, pengelolaan sampah yang efektif di institusi pendidikan seperti Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi limbah yang tidak terurai, menjaga kualitas air dan tanah, serta mempromosikan kesadaran lingkungan di kalangan siswa dan guru. Ini sejalan dengan tujuan SDGs ke-6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), ke-13 (Tindakan Terhadap Perubahan Iklim), dan ke-14 (Melestarikan Ekosistem Kelautan). Selain dampak lingkungan, pengelolaan sarpras juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, dan mendorong inovasi seperti daur ulang dan pemanfaatan ulang material. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk siswa, dalam proses ini, pengelolaan sarpras menjadi instrumen pendidikan yang membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya keberlanjutan. Contoh konkret, seperti pendirian bank sampah, tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, tetapi juga mendukung kreativitas siswa melalui penggunaan material daur ulang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sarpras tidak hanya mendukung tujuan SDGs secara langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.¹¹

Inovasi dan Tantangan Pengelolaan Sarpras di Era SDGs

Integrasi teknologi dalam pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) di era Sustainable Development Goals (SDGs) membuka peluang besar untuk inovasi, namun juga menghadirkan tantangan signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti E-learning, aplikasi berbasis digital, dan sistem manajemen berbasis data, pengelolaan sarpras dapat menjadi lebih efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Teknologi memungkinkan penghematan biaya, pengurangan limbah, serta pengoptimalan penggunaan energi dan sumber daya. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet di daerah terpencil, yang membuat implementasi teknologi kurang merata. Selain itu, diperlukan investasi besar dalam pengadaan perangkat dan pelatihan pengguna untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Tantangan lain adalah motivasi dan keterampilan pengguna, yang sering kali memerlukan pendekatan pelatihan khusus untuk mengembangkan kompetensi digital dan kemampuan mengelola teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pengelolaan sarpras memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor

¹¹ Laily Novika Nurdiani dan Azis Muslim, "Analisis Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri Sebagai Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," 2022.

swasta untuk memastikan bahwa solusi inovatif tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara luas.¹²

Selain itu, anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam pengadaan teknologi baru atau pelatihan bagi pengelola sarpras. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya investasi dalam teknologi untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Solusi potensial adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan, serta mendorong kebijakan akses internet murah. Dalam jangka panjang, integrasi teknologi yang berhasil tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan sarpras tetapi juga mendukung tujuan SDGs, seperti pendidikan berkualitas dan pengurangan kesenjangan teknologi.

KESIMPULAN

Optimalisasi sarana dan prasarana (sarpras) berbasis kode etik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan efisiensi manajemen, seperti yang terlihat di SMP Muhammadiyah 9 Boarding School. Sebelum penerapan kode etik dengan prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), pengelolaan sarpras ditandai oleh inefisiensi, ketidakteraturan, dan kurangnya transparansi, yang menghambat optimalisasi fasilitas pendidikan. Namun, setelah penerapan kode etik, pengelolaan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tanggung jawab yang terstruktur melalui Surat Keputusan (SK) dan evaluasi rutin untuk memastikan program pemeliharaan berjalan sesuai rencana. Fasilitas yang sebelumnya rusak telah diperbaiki tepat waktu, laboratorium dan ruang kelas menjadi lebih kondusif, serta pemanfaatan sarpras oleh guru dan siswa meningkat. Untuk mendukung keberlanjutan, pelatihan lanjutan bagi staf sarpras menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi mereka, sementara pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi mempermudah pengawasan dan evaluasi secara real-time. Praktik ini juga dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan lain untuk menciptakan standar pengelolaan sarpras yang lebih baik secara nasional, mendukung pencapaian SDGs dalam aspek pendidikan berkualitas dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dengan langkah ini, sekolah dapat mempertahankan standar pengelolaan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

¹² Tareze, Indri Astuti, dan Afandi, "MODEL PEMBELAJARAN KOLABORASI SDGs DALAM PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI PENGENALAN ISU GLOBAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN SOSIAL PESERTA DIDIK."

- Handika, Rizki Andre, Titik Istikhoratun, dan Luqman Buchori. "Kajian Peranan dan Penerapan Kode Etik Profesi Keinsinyuran dalam Praktik Pekerjaan Bidang Sipil dan Lingkungan di Indonesia untuk Meningkatkan Efisiensi dan Perlindungan Keselamatan Kerja" 2 (t.t.).
- Nurdiani, Laily Novika, dan Azis Muslim. "Analisis Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri Sebagai Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," 2022.
- Oleh, Disusun. "PROSEDUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR," t.t.
- Ramadhani, Milda Mutia. "Analisis Strategi Pendidikan Inklusif Berbasis Sains dan Teknologi dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di Indonesia," 2023.
- Rusandi dan Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2021): 48-60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Soro, Suharyanto H, Kadar Budiman, Dudi Suprihadi, dan Nur Ainiyah. "Implementasi Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Di Institut Perguruan Tinggi (IPT) Garut." *Journal for Islamic Studies* 6, no. 2 (2023).
- Suranto, Dwi Iwan, Saipul Annur, Ibrahim, dan Afif Alfiyanto. "PENTINGNYA MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 1, no. 2 (30 April 2022): 59-66. <https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>.
- Tareze, Maria, Indri Astuti, dan Afandi. "MODEL PEMBELAJARAN KOLABORASI SDGs DALAM PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI PENGENALAN ISU GLOBAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN SOSIAL PESERTA DIDIK." *Visipena* 13, no. 1 (21 Desember 2022): 42-53. <https://doi.org/10.46244/visipena.v13i1.1978>.
- Widiatmoko, Catur, Ratna Indriasari, Fathir Fajar Sidiq, dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa. "PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI WUJUD PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)." *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 6, no. 2 (20 November 2024): 40-47. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i2.273>.